

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama setiap negara dalam upaya memperoleh kesejahteraan, erat kaitannya dengan kegiatan produksi barang dan jasa, dimana semakin banyak hasil produksi barang maupun jasa berarti semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini menjadi paradigma yang berkembang di tengah masyarakat, produktifitas adalah upaya mencapai penghidupan yang lebih baik dan masyarakat terhindar dari keadaan hidup yang kurang layak.

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita luhur setiap negara, selain kewajiban negara untuk menjunjung tinggi hak-hak kelayakan hidup setiap manusia, kesejahteraan juga menjadi indikator pembangunan yang absolut dengan pertumbuhan ekonomi sebagai dimensi ukuran kesejahteraan, salah satu gejala kesejahteraan belum tercapai adalah kemiskinan.

Di Indonesia pemerintah menyadari bahwa pembangunan nasional merupakan salah satu indikator mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Secara eksplisit pembangunan nasional adalah pemaknaan dan pengaplikasian “mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang laten dalam kehidupan ekonomi suatu negara, disamping kelangkaan (*scarcity*), inflasi, pengangguran

(*unemployment*), ketimpangan, dan lainnya. Berbagai macam dampak kemiskinan mulai dari permasalahan ekonomi seperti sulit bertumbuhnya perekonomian dan bahkan kemiskinan juga menjadi salah satu faktor yang menimbulkan masalah sosial seperti tindakan kriminal dan krisis moral lainnya.

Permasalahan kemiskinan dapat dikatakan sebagai permasalahan yang multidimensional karena disebabkan oleh berbagai macam kasus, seperti ketidakberdayaan, kekurangan kapasitas diri, krisis modal sosial dan lain sebagainya dengan menimbulkan masalah-masalah yang tidak sebatas permasalahan ekonomi saja, sehingga setiap elemen masyarakat mempunyai peran sebagai upaya bersama mengentaskan kemiskinan. Konteks kemiskinan yang multidimensional maka dapat dipahami bahwa tidak hanya ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi individu atau kelompok orang dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Todaro (1998), sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi dari bangsa yang bersangkutan. Tolak ukur yang digunakan di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi valuasi dari beberapa aspek seperti tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). IPM dapat mengindikasikan adanya heterogenitas setiap individu, taraf penghidupan manusia tidak serta merta diwakili dengan tingkat pendapatan saja akan tetapi kondisi sosial masyarakat menjadi rangkaian penting dalam

pembangunan dan pembebasan masyarakat dari kemiskinan baik pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang.

Pembangunan manusia juga merupakan tujuan dari Pembangunan itu sendiri (Todaro,1998), manusia menjadi pemeran kunci dalam kehidupan ekonomi dengan kapasitas dan penghidupan yang dimiliki, sehingga secara umum mampu menafsirkan kekuatan kolektif sebuah negara dengan kemampuan masing-masing individu sesuai dengan perannya masing-masing, artinya, selain menjadi objek pembangunan juga masyarakat dalam suatu negara menjadi subjek yang memerankan tugasnya untuk pembangunan secara makro negara tersebut.

Selain IPM, jumlah penduduk menjadi indikator penting dari penilaian pembangunan, sebagaimana paradigma umum menilai bahwa salah satu ciri negara berkembang adalah jumlah penduduk yang relatif banyak. Karena banyak *excess* yang ditimbulkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk, akibat bertambahnya volume angkatan kerja yang relatif banyak dipahami menjadi sebab menyempitnya kesempatan kerja, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan lain sebagainya.

Secara *general* profil kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik per September 2016 menunjukkan penurunan, yang semula 28,01 orang (10,86%) pada Maret 2016 menurun sebesar 0,25 juta pada September 2016 menjadi 27,76 juta orang (10,70%). Tapi pada saat bersamaan presentase penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,34 juta orang pada Maret 2016 menjadi 10,49 juta orang pada September 2016).

Di Pulau Jawa yang merupakan pulau dengan penduduk terbanyak yang mendeskripsikan berbagai hal mengenai penduduk Indonesia, profil kemiskinan pada daerah perkotaan di Jawa menunjukkan 7,04 orang penduduk miskin (7,74%) dan pada daerah pedesaan sebanyak 7,79 orang penduduk miskin (13,94%). Bila ditotalkan penduduk miskin di Jawa sebanyak 14,84 juta orang (14,72%) angka tersebut menunjukkan bahwa setengah dari penduduk miskin di Indonesia berada di pulau ini.

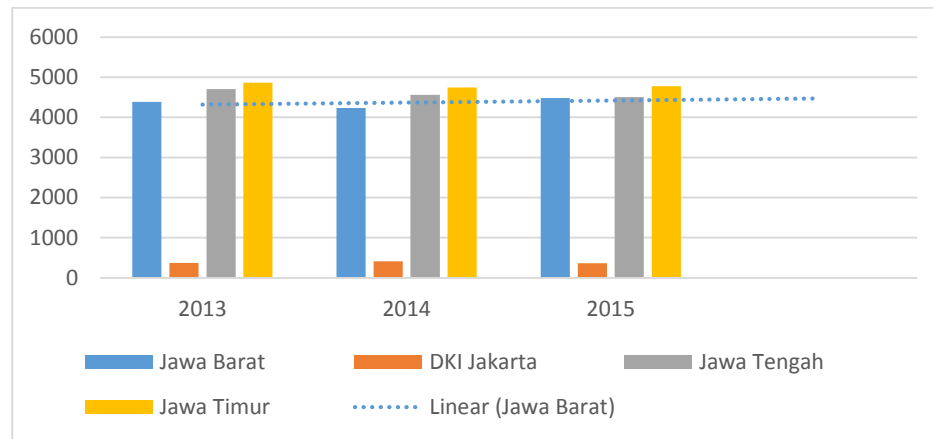
Dengan kemajuan secara milenial di Pulau Jawa, angka kemiskinan tertinggi bisa dianggap relevan dengan realita sosial tapi juga bisa berlawanan dengan harapan pembangunan, pada dasarnya pembangunan ekonomi yang diharapkan di Pulau Jawa adalah memajukan segala proses penghidupan masyarakatnya mulai dari infrastruktur hingga ekspektasi dari kegiatan ekonomi, akan tetapi disparitas kesenjangan yang sangat tinggi di Jawa menjadi pertanyaan penting untuk mengungkap realitanya.

Provinsi-provinsi di Jawa sudah mengalami perkembangan wilayah yang cukup signifikan tetapi bukan berarti merepresentasikan keadaan sebenarnya secara menyeluruh, beberapa daerah dari satu wilayah provinsi mesti ada saja yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi, artinya perkembangan milenial Pulau Jawa masih mempunyai permasalahan penting yakni angka kemiskinan yang cukup tinggi dengan berbagai faktor penyebab dan malah menimbulkan berbagai pertanyaan.

Secara umum dalam penelitian sebelumnya, berdasarkan hasil empirik di lapangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan per provinsi di Indonesia antara lain adalah indeks pembangunan manusia (terdiri dari pendapatan perkapita, angka harapan hidup, dan rata-rata bersekolah), investasi fisik pemerintah daerah, tingkat kesenjangan pendapatan, tingkat partisipasi ekonomi dan politik perempuan, populasi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan, populasi penduduk tanpa akses terhadap air bersih, dan krisis ekonomi (Saleh, 2002).

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang menjadi sorotan dalam pembahasan mengenai kemiskinan, terhitung pada semester 2 tahun 2013 Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa dengan jumlah 2.626.160 jiwa akan tetapi dengan berjalannya waktu terhitung pada semester 2 tahun 2016 menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin ketiga terbanyak di bawah Jawa Timur dan Jawa tengah dengan 4.168.110 jiwa. Meskipun terhitung jumlahnya sangat banyak akan tetapi dengan melihat statistik pada provinsi lain di Jawa, provinsi Jawa Barat mampu menahan gejala sosial kemiskinan dengan meredamnya tidak meningkat secara drastis setiap tahun tidak seperti provinsi lainnya yang ada di Jawa yang jumlah penduduk miskinnya meningkat secara tajam seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur bahkan Daerah Istimewa Ibukota Jakarta.

Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (2013-2015) (000)



Sumber : Grafik diolah

Dalam penelitian sebelumnya, menurut data yang telah dihimpun dan gejala yang terjadi beberapa faktor yang determinan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat adalah pendapatan dan pendidikan, kemudian jumlah pengangguran dan tingkat ketergantungan berpengaruh pada tingkat tertentu. Adapun selain beberapa faktor sebelumnya, faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan di Provinsi Jawa Barat pada taraf nyata tertentu adalah tenaga kerja dan investasi dengan variabel dummy kota/kabupaten berpengaruh juga pada taraf nyata tertentu (Nurhayati, 2007).

Kemudian salah satu hal yang membuat kemiskinan semakin parah adalah masalah kesenjangan (Annim, 2012), dan keduanya menjadi memiliki hubungan yang pragmatis, karena dengan hasil empiris dari kondisi sebenarnya di masyarakat bahwa keduanya mempunyai hubungan yang positif, dalam perspektif lain bahwa dimensi kemiskinan dapat dipandang melalui sisi kesenjangan di mana

ketidakmerataan yang terjadi di suatu kelompok masyarakat, utamanya pada kelompok yang tergolong miskin dengan masyarakat lain (Sen, 1981).

Tabel 1.1

Tabel Gini Ratio Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Tahun 2013-2016

PROVINSI	2013	2014	2015	2016
DKI JAKARTA	0.404	0.436	0.421	0.397
JAWA BARAT	0.406	0.398	0.426	0.402
JAWA TENGAH	0.390	0.388	0.382	0.357
JAWA TIMUR	0.368	0.403	0.403	0.402

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang mempunyai kesenjangan yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan komponen gini ratio pedesaan dan perkotaan. Lain halnya dengan provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tingkat gini ratio dengan rata-rata paling tinggi tetapi komponennya hanya terdiri dari wilayah perkotaan dan luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang mempunyai wilayah lebih luas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Adi Saputra (2011) untuk menganalisis tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah (2005-2008), penelitian ini menggunakan metode regresi data panel, yang juga menggunakan variabel jumlah Penduduk, PDRB, IPM, dan pengangguran. Memperoleh hasil bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan.

Atas beberapa dasar tersebut dirasa perlu untuk diteliti kausalitas yang terjadi antar variabel-variabel yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di provinsi Jawa Barat terhitung sejak tahun 2012 hingga 2016 sebagai *benchmark* analisis kemiskinan di tahun selanjutnya, maka penulis mengangkat tema **“Analisis Pengaruh Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa konteks pembahasan yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini

1. Seberapa besar pengaruh Gini Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat (2012-2016)?
2. Seberapa besar pengaruh IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat (2012-2016)?
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat (2012-2016)?

C. Tujuan Penelitian

Dari adanya pembatasan dan perumusan masalah diatas, diharapkan penelitian ini mempunyai capaian yang diharapkan dalam pembahasannya, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh Gini Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat (2012-2016).

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat (2012-2016).
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat (2012-2016).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang memberikan kontribusi di bidang akademis dalam upaya mengidentifikasi pembangunan regional Jawa Barat.

2. Manfaat Praktis:

Sebagai bahan informasi atau media yang memberikan masukan dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun regulasi dan atau solusi untuk bidang-bidang tertentu yang mempunyai hubungan dengan konteks penelitian ini.